

NARASI KOMUNIKASI JURNALIS PEREMPUAN YANG MENGALAMI DISKRIMINASI GENDER

Akhlaqul Kharimah, Hapsari Dwiningtyas

akhlaqulharimah29@gmail.com

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> / e-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The field of journalism is known as a *male-dominated route that gives rise to a culture and way of thinking dominated by masculinity. This often results in restrictions and discrimination in terms of opportunities and rights for women to carry out their roles and duties as journalists. Therefore, this study aims to understand the communication narratives of female journalists in facing gender-based discrimination in their career paths in the mass media industry. Three female journalists working in online media, television, and radio were interviewed to explore the communication coordination process they undertook when facing gender discrimination, both within media companies and with external parties. Using Todorov's narrative analysis method, this study found that experiences of discrimination are not singular, but rather dynamic. This process can be found through the communication established by female journalists in pursuing their journalistic careers, experiencing obstacles or problems that have discriminatory connotations such as stereotypes and sexism, to the point of giving rise to critical reflections on the understanding and management of communication in overcoming the problems faced. The results of the study show that in the process of coping, female journalists developed three strategic patterns, including performative resistance through the quality of their reporting, professional ethical negotiations to maintain relationships, and interactional adjustments in workplace communication. These findings confirm that female journalists' experiences of discrimination not only represent individual issues, but also become a source of critical knowledge that reveals structural bias and the meaning of professionalism in journalistic practice.*

Keywords: Journalism, Mass Media, Female Journalists, Communication Narratives, Gender Discrimination

ABSTRAK

Bidang jurnalistik dikenal sebagai *male dominated route* yang melahirkan suatu dominasi budaya dan pemikiran maskulin. Hal tersebut kerap berdampak kepada pembatasan dan perbedaan kesempatan serta hak perempuan untuk menjalankan peran dan tugasnya sebagai jurnalis. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk memahami narasi komunikasi jurnalis perempuan dalam menghadapi diskriminasi berbasis gender dalam perjalanan kariernya di industri media massa. Sebanyak tiga narasumber jurnalis perempuan yang bekerja di media *online*, televisi, dan radio, untuk mengeksplorasi proses pengelolaan koordinasi komunikasi yang mereka lakukan ketika menghadapi tindak diskriminasi gender, baik di perusahaan media maupun dengan pihak eksternal. Melalui metode analisis naratif Todorov, penelitian ini menemukan bahwa pengalaman diskriminasi tidak bersifat tunggal, melainkan penuh dinamika. Proses tersebut dapat ditemukan melalui komunikasi yang terjalin oleh jurnalis perempuan dalam meniti karier jurnalistik, mengalami hambatan atau permasalahan yang memiliki konotasi diskriminatif seperti stereotipe dan seksisme, hingga memunculkan refleksi kritis terhadap pemahaman dan pengelolaan komunikasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaiannya, jurnalis perempuan mengembangkan tiga pola strategi, meliputi resistensi performatif melalui kualitas liputan, negosiasi etika profesional untuk menjaga relasi, serta penyesuaian interaksional dalam komunikasi di pekerjaan. Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman diskriminasi jurnalis perempuan tidak hanya merepresentasikan persoalan individu, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan kritis yang mengungkap bias struktural sekaligus makna profesionalisme dalam praktik kerja jurnalistik.

Kata kunci: Jurnalistik, Media Massa, Jurnalis Perempuan, Narasi Komunikasi, Diskriminasi Gender

PENDAHULUAN

Jurnalistik dikenal sebagai *male dominated route* atau bidang kerja yang didominasi oleh laki-laki. Dalam laporan riset berjudul “*Jejak Jurnalis Perempuan, Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia*” oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2012, perbandingan jumlah jurnalis perempuan lebih sedikit daripada jurnalis laki-laki, yaitu rata-rata 1:4 sampai 1:3 di setiap media (Luviana, 2012). Dominasi gender ini berpotensi membatasi kesempatan representasi jurnalis perempuan dan turut melanggengkan praktik diskriminasi

berbasis gender dalam industri media massa di Indonesia.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) menetapkan istilah “diskriminasi terhadap perempuan” sebagai bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan berdasarkan pada jenis kelamin dengan tujuan untuk mencegah atau meniadakan upaya perempuan untuk mengakui, menikmati, dan menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka di segala bidang kehidupan, tanpa memandang status perkawinan mereka, serta atas dasar

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sering kali, isu diskriminasi terjadi karena stereotipe gender dan patriarki yang sudah “membudaya” di Indonesia. Munculnya stereotipe tersebut merupakan buah konstruksi sosial yang seolah-olah menilai perbedaan-perbedaan gender sebagai “kodrat kultural” dan dalam proses yang panjang dapat mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan (Fakih, 2013). Ditambah lagi adanya masyarakat patriarki yang berusaha mempertahankan dominasi laki-laki sehingga menyebabkan ketimpangan dan diskriminasi gender masih terjadi, terutama di media massa (Stellarosa & Martha, 2019).

Laporan riset oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) pada tahun 2021 yang berjudul “*Proyek Riset Nasional: Gambaran dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Media di Indonesia*” meninjau kondisi perjalanan karier 258 jurnalis perempuan dalam perusahaan media di Indonesia. Melalui riset ini, PPMN menyajikan data mengenai tiga hambatan utama — responden memilih tiga jenis hambatan dari opsi yang disediakan pada pertanyaan — yang dialami jurnalis perempuan selama menjalani kariernya. Hasilnya menunjukkan, stereotipe negatif tentang perempuan dan diskriminasi gender menjadi faktor hambatan terbesar dengan

perolehan persentase yang sama, yaitu sebesar 45% (Idris dkk., 2021).

Di samping itu, untuk mengkaji pola-pola hambatan karier, Idris dkk. (2021) menggolongkannya ke dalam tiga level, yakni level individu, level organisasional, dan level sosial budaya. Berkenaan dengan level hambatan yang paling dirasakan oleh jurnalis perempuan selama berkarier di bidang kewartawanan, hambatan pada level organisasional mendominasi dengan persentase sebesar 48%, sementara level individu mencapai 33%, dan sosial budaya mencapai 19% (Idris dkk., 2021). Data tersebut mengindikasikan bahwa lingkup perusahaan media sebagai institusi kerja merupakan sumber utama terjadinya hambatan bagi sebagian jurnalis perempuan.

Hambatan organisasional dapat terjadi karena perusahaan media masih mempraktikkan kebijakan *male centric* yang terbentuk dari berbagai pandangan stereotipe negatif kepada perempuan. Alhasil, kebijakan yang selayaknya egaliter untuk perempuan masih dijalankan secara patriarkis, serta akar pandangan stereotipe membuat perusahaan akan melakukan diskriminasi terhadap perempuan secara internal mulai dari proses rekrutmen, sistem penilaian, hingga struktur yang tidak merata di dalam organisasi (Idris dkk., 2021).

Adapun perbedaan pembagian kerja redaksional antara jurnalis perempuan dan laki-laki dengan menempatkan jurnalis perempuan pada liputan yang dianggap "lunak" atau terkait dengan stereotipe peran perempuan (Ashaf dkk., 2019). Beberapa topik yang termasuk ke dalamnya adalah liputan tentang industri hiburan (*entertainment*), budaya, gaya hidup (*lifestyle*), pendidikan, pariwisata, dan kesehatan.

Merujuk kepada riset bertajuk "*Potret Jurnalis Indonesia 2025*", gambaran komposisi pembagian tugas peliputan berdasarkan gender dari masing-masing segmentasi topik menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mengambil peran di topik kesehatan dengan persentase sebesar 52,6% (Masduki dkk., 2025). Adapun beberapa topik yang cukup banyak digeluti oleh jurnalis perempuan meskipun tidak mencapai setengah komposisinya, seperti topik hiburan dan travel 41,5%, topik ekonomi dan industri 37,2%, dan topik pendidikan dan keluarga 37,1% (Masduki dkk., 2025). Hal ini dapat mencerminkan bias struktural yang membatasi perempuan untuk mendapatkan kesempatan peliputan yang prestisius, seperti olahraga, politik, dan hukum. Dengan membatasi jurnalis perempuan untuk berkembang dalam bidang jurnalistik akan menguatkan pandangan negatif bahwa jurnalis perempuan tidak dapat menangani

tugas yang berbobot kompleks seperti jurnalis laki-laki.

Riset yang dilakukan oleh AJI bersama Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) pada tahun 2022 dengan judul "*Jalan Terjal Menuju Kesetaraan (Laporan Riset Diskriminasi Gender di Organisasi Media)*" menggambarkan pandangan dan pengalaman dari 405 jurnalis perempuan terkait praktik diskriminasi gender yang terjadi di instansi kerja mereka. Salah satu aspek penting dan mendasar yang disoroti adalah pemberian upah kerja atau remunerasi. Remunerasi tidak hanya berupa gaji pokok saja, tetapi juga mencakup tunjangan dan intensif. Riset mencatat, 17% responden mengungkapkan telah mengalami diskriminasi terkait remunerasi (Wendratama dkk., 2023). Praktik diskriminasi pada aspek ini tampak dari kesenjangan antara upah kerja yang masih terjadi antara jurnalis perempuan dan laki-laki, sekalipun mereka berada pada posisi dan tingkat kualifikasi yang setara.

Salah satu partisipan *Focus Group Discussion* (FGD) turut membagikan pengalamannya mengenai remunerasi dalam laporan riset tersebut. Ia menyampaikan bahwa hanya jurnalis laki-laki yang mendapat uang transportasi, sementara jurnalis perempuan tidak. Setelah menyuarakan kondisi timpang tersebut kepada pihak keuangan, tanggapan

yang diperolehnya adalah “*Ya sudah begitu*” (Wendratama dkk., 2023). Seakan mengamini perbedaan pembagian upah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan atas pandangan gender dalam regulasi dan praktiknya di media.

Bayang-bayang stereotipe negatif tentang perempuan juga dapat berpengaruh terhadap pandangan dan penilaian kinerja jurnalis perempuan oleh perusahaan. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan tidak menerapkan kebijakan ramah gender sehingga hak-hak jurnalis perempuan tidak terpenuhi. Riset PR2Media tersebut turut membahas diskriminasi hak yang menyangkut reproduksi perempuan, seperti hak cuti melahirkan dan hak cuti haid. Hasilnya menunjukkan, 12% responden (47 jurnalis) tidak mendapatkan cuti melahirkan dan sebanyak 68% responden (275 jurnalis) tidak mendapatkan hak cuti haid (Wendratama dkk., 2023). Praktik tersebut masih terjadi meskipun telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Indonesia, 2003). Murniati (2004) berpendapat bahwa pandangan rendah oleh perusahaan terhadap peran reproduksi perempuan dapat memanasifasikan perendahan nilai kerja perempuan. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi nilai jurnalis perempuan dan tidak memprioritaskan perempuan untuk menempati posisi strategis di perusahaan (Idris dkk., 2021).

Paparan hasil riset di atas menunjukkan bahwa masih terdapat hak-hak reproduksi jurnalis perempuan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan media, sebab perusahaan cenderung menilai performa kerja semata-mata dari sisi profitabilitas. Menurut Ihromi dkk. (2000), kebijakan untuk melindungi hak reproduksi perempuan masih didukung dan dijalankan oleh “penguasa” berdasarkan versinya sendiri, dalam konteks ini adalah mendukung dan menjalankan kebijakan yang mampu menguntungkan perusahaan media.

Praktik diskriminasi pun terjadi pada rapat redaksional. Dalam uraian data riset, ditemukan kurangnya pengakomodasian suara jurnalis perempuan seperti halnya jurnalis laki-laki yang berkenaan dengan dua kategori, yaitu dalam mengenai manajemen ataupun kebijakan perusahaan dengan persentase sebesar 15% dan perihal liputan dengan persentase sebesar 11% (Wendratama dkk., 2023). Kedua kondisi tersebut akan mengecilkan kontribusi dan peran perempuan dalam struktur perusahaan. Namun, melihat dari pelaku media, meliputi jurnalis, redaktur, pemimpin redaksi, hingga pemilik media yang masih didominasi oleh laki-laki juga menyebabkan harapan penyajian berita yang mengedepankan perspektif gender semakin menipis (Satriyani & Siti Hariti, 2008).

Menurut PR2Media (2021), hasil riset terhadap 1.256 jurnalis perempuan menunjukkan bahwa 86% menyatakan pernah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun digital sepanjang karier jurnalistik mereka. Sebesar 70% responden mengalami kedua jenis kekerasan (kekerasan fisik dan digital), 8% responden hanya mengalami kekerasan fisik, dan 8% responden hanya mengalami kekerasan digital. Lima bentuk kekerasan di ranah fisik yang dialami jurnalis perempuan Indonesia dengan persentase terbesar, di antaranya menerima komentar *body shaming* sebesar 59%, mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual sebesar 40%, mengalami ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual sebesar 37%, mengalami diskriminasi gender di tempat kerja sebesar 32%, dan mengalami serangan fisik yang bersifat seksual sebesar 22%. Hal ini menunjukkan realitas kondisi pekerja media perempuan yang dalam kariernya rentan menghadapi ketidakadilan dan kekerasan, baik di ranah fisik maupun digital.

Sesungguhnya bekerja dan mendapat perlakuan serta perlindungan terbaik di tempat kerja merupakan hak seluruh warga negara Republik Indonesia. Ini pun didukung dengan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan (Indonesia, 1945). Upaya pengarusutamaan gender dalam perusahaan juga dapat merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (Indonesia, 1984). Peraturan tersebut memuat pasal-pasal yang menjadi acuan dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Salah satunya, yaitu terpatri pada Pasal 11 yang mengharuskan negara mengambil langkah atau membuat peraturan yang tepat untuk menangani diskriminasi dan memenuhi seluruh hak perempuan di lapangan kerja (Ihromi dkk., 2000).

Konvensi International Labour Organization (ILO) pun merumuskan setidaknya tiga prinsip kesetaraan yakni, memperoleh gaji yang adil, kesempatan kerja yang sama, serta mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan diri tanpa batasan stereotype dan prasangka peran gender. Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang meratifikasi regulasi untuk mendukung kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk Konvensi ILO No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama dan Konvensi ILO No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan (Ihromi dkk., 2000).

Meninjau dari pembahasan kondisi dan data yang telah diuraikan, masih terdapat tantangan dan hambatan bagi jurnalis perempuan dalam menjalankan dan mengembangkan karier di industri media massa. Perusahaan maupun lingkungan kerja kerap menormalisasi praktik-praktik yang sebenarnya mengandung unsur diskriminasi gender. Hasilnya, membentuk bingkai perlakuan diskriminatif sebagai sesuatu yang “sudah biasa” atau “sudah sewajarnya seperti itu” dalam pekerjaan. Akibat lain yang timbul adalah jurnalis perempuan yang berada dalam sistem tersebut cenderung tidak mengenali atau menyadari bahwa mereka sedang menghadapi dan mengalami diskriminasi.

Oleh sebab itu, pengalaman para jurnalis perempuan tersebut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dan dipahami secara mendalam. Melalui pengalaman-pengalaman yang ada, mereka dapat merefleksikan bagaimana diskriminasi gender hadir pada bentuk-bentuk ketimpangan maupun bias gender, serta kemudian memberi dampak sistemis terhadap posisi, peran, dan pengakuan perempuan di dalam industri media massa. Dengan demikian, topik ini menarik dan relevan untuk diteliti guna memahami dan memberikan gambaran empiris tentang kondisi yang dialami melalui sudut pandang dan pemaknaan oleh para jurnalis perempuan di dunia kerja media.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami narasi komunikasi jurnalis perempuan atas pengalaman diskriminasi gender yang terjadi saat berkarier di industri media massa.

KERANGKA TEORI

Feminist Standpoint Theory

Natalie Fixmer-Oraiz dan Julia T. Wood dalam buku yang berjudul *Gendered Lives: Communication, Gender, and Culture* menjelaskan bahwa standpoint theory berakar dari tulisan filsuf Jerman yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel dan Karl Marx. Hegel yakin pada suatu kondisi ketimpangan kekuasaan pun tidak mungkin ada perpektif tunggal tentang kehidupan sosial. Sementara pemikiran lain yang dibawa oleh Karl Marx ke dalam teori sudut pandang yaitu posisi sosial seseorang juga memengaruhi segala aktivitas dan pekerjaan sehingga mampu membentuk kesadaran, pengetahuan, dan identitas sosialnya tersendiri (Fixmer-Oraiz dan Wood, 2019).

Dengan demikian, teori sudut pandang memenuhi interaksionisme simbolik melalui pemaknaan atas masyarakat terdiri dari kelompok majemuk yang memiliki jumlah kekuasaan dan privilese berbeda-beda (Fixmer-Oraiz & Wood, 2019). Untuk memperoleh sudut pandang ini, individu harus berpikir kritis

mengenai relasi kekuasaan dalam kehidupan sosial dan terlibat dalam perjuangan menentang sikap dominan dalam suatu budaya. Kemudian, sudut pandang akan tumbuh dari posisi sosial setiap individu dalam kelompok masyarakat tersebut (Fixmer-Oraiz & Wood, 2019).

Akan tetapi, beberapa sudut pandang yang tercipta bersifat parsial atau terbatas. Teori sudut pandang muncul karena pengakuan adanya ketimpangan kekuasaan yang membuat kelompok-kelompok tertentu menjadi tertindas atau termarginalkan. Hal ini berujung kepada pembentukan sudut pandang individu dari kelompok marginal berbeda dengan kelompok dominan (Littlejohn dkk., 2017). Sudut pandang kelompok dominan akan cenderung mengalami bias karena mereka tetap akan mempertahankan status quo dari posisi sosialnya dan mengabaikan perspektif dari kelompok marginal. Sementara kelompok marginal dituntut untuk memahami dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif mereka sebagai kelompok marginal dan perspektif kelompok dominan yang memiliki kuasa atas suatu sistem (Kroløkke & Sørensen, 2006). Sudut pandang seperti itu bisa memperoleh dimensi politis ketika individu-individu dari kelompok marginal tersadar akan ketidaksetaraan posisi dalam struktur sosial dan budaya dominan sehingga mereka

berusaha mempertanyakan dan menentang bentuk-bentuk dominasi tersebut (Littlejohn dkk., 2017).

Begitu pula yang diperjuangkan oleh para perempuan melalui feminist standpoint theory. Perkembangan feminist standpoint theory tidak lepas dari kontribusi para peneliti, salah satunya adalah Nancy Hartsock. Melalui penerapan konsep Hegel mengenai perbudakan serta gagasan Marx yang mengkritik kelas dan kapitalisme pada isu-isu sex dan gender, Hartsock meneliti adaptasi standpoint theory terhadap hubungan antara perempuan dan laki-laki dari kacamata perempuan (West & Turner, 2010).

Terdapat empat asumsi yang menjadi ciri pandang Marxis dari Hartsock tentang feminist standpoint theory (West & Turner, 2010), yaitu semua pengetahuan merupakan hasil dari aktivitas sosial yang dibentuk secara subjektif, posisi sosial dan kondisi budaya menghasilkan pengalaman dan pbingkaiian pengalaman secara berbeda oleh perempuan dan laki-laki, penelitian dan teori sebaiknya dimulai dari sudut pandang orang-orang terpinggirkan (marginal), dalam hal ini adalah perempuan, dan melalui teori ini perempuan menjadi partisipan penelitian dengan menceritakan pengalaman yang telah mereka interpretasikan secara pribadi

Coordinated Management of Meaning (CMM)

Coordinated Management of Meaning (CMM) atau Teori Manajemen Makna Terkoordinasi adalah teori yang dikembangkan oleh W. Barnett Pearce dan Vernon Cronen yang berakar dari pemikiran mereka bahwa setiap individu menjalin komunikasi melalui serangkaian *rules* (aturan) (West & Turner, 2010). Dalam hal ini, aturan menjadi suatu pedoman yang membantu seseorang menetapkan makna dan mengambil tindakan. Secara lebih lanjut, aturan tersebut masuk ke dalam prinsip-prinsip utama teori CMM yang dirangkum menjadi tiga kategori, yaitu *meaning and action*, *coordination*, dan *story telling* (Littlejohn dkk., 2017).

Pertama, *meaning and action* atau berarti makna dan tindakan, merupakan hal fundamental yang dilakukan oleh komunikator dalam setiap situasi sosial. Seorang individu akan menerapkan dua fungsi yang memiliki hubungan kausal, di mana makna mengarahkan pesan kepada tindakan, dan tindakan membentuk makna. Kedua fungsi tersebut yang menjadi aturan dasar bagi seseorang dalam berkomunikasi. Terdapat dua jenis aturan yang berlaku, yaitu aturan konstitutif dan aturan regulatif. Aturan konstitutif atau yang disebut juga sebagai aturan makna merupakan aturan yang digunakan oleh komunikator untuk memaknai dan memahami suatu peristiwa

dan pesan yang terjalin di dalam proses komunikasi dengan orang lain. Sementara aturan regulatif atau aturan tindakan mengacu kepada cara komunikator berperilaku atau menyampaikan respons atas situasi tersebut (Littlejohn & Foss, 2009). Dengan kata lain, individu mengoordinasikan makna dan tindakannya sekaligus menanggapi makna dan tindakan dari orang lain.

Dalam teori CMM, situasi komunikasi tersebut dapat tercipta atas bentuk *logical force* (kekuatan logis) yang merupakan hubungan kognitif antara makna dan tindakan. Logika-logika ini diperoleh individu dari latar belakang dan pengalamannya di berbagai dunia sosial. Nantinya, *logical force* akan membantu menjelaskan alasan yang memengaruhi seseorang untuk mengatakan atau melakukan sesuatu. *Logical force* dalam CMM terdiri dari empat jenis, yakni *Preguratif force* yaitu tindakan komunikator ditentukan oleh sesuatu yang terjadi sebelumnya (antisenden); *Contextual Force* yaitu tindakan komunikator bergantung kepada konteks atau situasi tertentu; *Implicative force* yaitu tindakan komunikator dirancang untuk mengubah konteks atau situasi yang ada; dan *Practical force* yaitu tindakan komunikator bertujuan untuk mencapai hasil praktis.

Proses menghubungkan makna dan tindakan menciptakan pola interaksi yang disebut sebagai *loop*. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya konsistensi. Ketika proses antara makna dan tindakan berjalan secara konsisten, maka *loop* penyampaian pesan dapat terbentuk dengan optimal atau disebut juga *charmed loop*. Begitu pula sebaliknya, proses makna dan tindakan yang tidak konsisten akan menimbulkan pergeseran konteks atau makna dalam pesan, seperti miskonsepsi dan paradoks. Kondisi tersebut dikenal sebagai *strange loop* (Littlejohn & Foss, 2009).

Kedua, *coordination* atau koordinasi. Koordinasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua atau lebih orang untuk mengatur makna dan tindakan ke dalam pola interaksi yang logis bagi mereka. Penggambarannya seperti ini, jika orang pertama melakukan tindakan, orang lainnya harus menafsirkan tindakan tersebut. Demikian juga dengan orang lain yang harus bertindak untuk merespons tafsiran yang ia miliki. Hingga kembali pada orang pertama yang akan menafsirkan respons orang lain untuk memberikan tindakan selanjutnya. Apabila proses interaksi ini berjalan dengan lancar, artinya koordinasi kedua belah pihak telah berhasil menciptakan pola interaksi yang logis (Littlejohn & Foss, 2009).

Ketiga, *storytelling* atau penyampaian cerita. Cerita menuntun individu dalam membingkai pengalaman dengan menjadi sarana dalam menyusun logika interaksi dan memahami dunia sosial, baik milik diri sendiri maupun orang lain. Teori CMM menjelaskan gagasan cerita melalui salah satu alat analisis yang dinamakan LUUUUTT. Secara lebih lanjut, Griffin dkk. (2019) menguraikan alat analisis tersebut sebagai instrumen yang membantu individu dalam mempertimbangkan mengeksplorasi berbagai kemungkinan makna dalam suatu cerita.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis naratif. Data yang digunakan adalah data primer berupa teks yang disusun dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, yaitu tiga jurnalis perempuan yang pernah mengalami diskriminasi gender dalam kariernya. Serta data sekunder yang diperoleh melalui referensi buku, artikel jurnal, hasil riset lembaga resmi, dan artikel portal berita *online*. Kemudian, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan studi narsi oleh Todorov.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap informan dalam penelitian ini mempunyai pola komunikasi yang

bereda-beda dalam menghadapi diskriminasi gender dalam perjalanan kariernya. Berdasarkan pada kisah awal memuai karier di bidang jurnalistik, motivasi ketiga informan timbul dari titik awal yang berbeda, namun ketiganya sama-sama memperlihatkan pola awal yang kokoh sebagai landasan profesional dalam mengawali karier. Pada kisah yang disampaikan, ketiga informan mengasah pengalaman-pengalaman praktis yang didapat ke jenjang pendidikan tinggi hingga ranah profesional.

Strategi yang dikembangkan jurnalis perempuan mencakup resistensi performatif (membuktikan kapasitas lewat liputan berkualitas), keputusan-profesional (menjaga komunikasi dengan tetap mempertimbangkan konteks kejadian), dan penyesuaian interaksional (mengalihkan topik, menjaga jarak, atau mengelola komunikasi digital). Strategi-strategi ini memperlihatkan pola antara perlawanan dan penyesuaian berdasarkan kondisi dan konteks yang dihadapi oleh jurnalis perempuan.

Jurnalis perempuan yang mengelola komunikasi sebagaimana bentuk resistensi performatif mampu memahami kondisi diskriminasi secara langsung dengan penalaran logis dan kritis agar memunculkan pertimbangan antara realitas penugasan di lapangan dengan kapasitas atau kemampuan diri sebagai jurnalis

perempuan. Sehingga ketika dirinya merasa bahwa secara kapasitas ia mampu untuk menjalani tugas tersebut, maka kemudian menghadirkan respons agar tetap bisa dilibatkan dan penugasan liputan untuk membuktikan kemampuan yang ditorehkan melalui hasil liputan.

Jurnalis perempuan dengan bentuk komunikasi yang didasari pada profesionalitas mengedepankan pertimbangan atas konteks yang dihadapi, baik berkaitan dengan agenda redaksi maupun dengan klien dari luar. Hadirnya pemahaman untuk mempertimbangkan hal tersebut menuntut kepada penyesuaian diri terhadap kondisi dan konteks yang akan berdampak kepada dirinya maupun perusahaan media. Adapun pada narasi menemukan bahwa jurnalis perempuan sempat menerima negosiasi, tetapi pihak klien tetap pada keputusan awal. Sehingga, penyelesaian akhir dari hambatan jurnalis perempuan adalah mengompromi atau menerima keputusan yang diambil oleh redaksi maupun pihak eksternal tersebut.

Jurnalis perempuan yang menerapkan penyesuaian interaksional memahami bahwa tindak diskriminasi yang dihadapi selalu memiliki pola yang sama dan akan terjadi secara berulang. Dalam hal ini, jurnalis perempuan juga tidak memiliki pilihan untuk mengubah konteks pada kondisi yang ada, baik yang terjadi pada lingkup perusahaan media maupun dengan

pihak eksternal. Oleh karena itu, jurnalis perempuan mengupayakan adanya penyesuaian saat mengelola interaksi dengan pihak-pihak terkait, seperti mengalihkan pembicaraan, menjaga jarak saat muncul hambatan diskriminasi dalam komunikasi, atau pun mengelola komunikasi yang dilakukan secara daring. Proses tersebut menuai pola tindakan yang sama sehingga jurnalis perempuan menjalankannya sebagai suatu risiko yang dihadapi, dibandingkan harus melaporkan dan menyebabkan permasalahan semakin kompleks.

Dengan menggunakan Feminist Standpoint Theory dan Coordinated Management of Meaning (CMM), penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi jurnalis perempuan bukan hanya cerita individu, melainkan sumber pengetahuan kritis. Dari posisi yang termarginalisasi, mereka mampu mengungkap bias struktural sekaligus menegosiasikan makna profesionalisme melalui interaksi sehari-hari.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan memahami narasi komunikasi jurnalis perempuan terhadap pengalaman diskriminasi gender telah tercapai. Beberapa poin yang dapat ditarik, yaitu

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa pengalaman komunikasi jurnalis perempuan dalam menghadapi diskriminasi gender terbentuk melalui proses koordinasi, pengelolaan pemahaman, hingga pencarian solusi atas hambatan yang dihadapi. Motivasi awal yang kuat mendorong mereka meniti karier jurnalistik, namun dalam perjalanannya muncul hambatan berupa stereotipe dan seksisme baik dari internal redaksi maupun pihak eksternal.

Kedua, Untuk menghadapinya, jurnalis perempuan mengembangkan strategi komunikasi yang beragam, meliputi resistensi performatif dengan membuktikan kapasitas melalui hasil liputan, keputusan profesional yang berorientasi pada etika dan konteks, serta penyesuaian interaksional dalam menjaga relasi kerja. Strategi ini menunjukkan adanya pola perlawanan sekaligus adaptasi sesuai situasi yang dihadapi.

Ketiga, melalui kerangka Feminist Standpoint Theory dan Coordinated Management of Meaning (CMM), pengalaman diskriminasi yang dialami tidak hanya dilihat sebagai kisah individual, melainkan juga sebagai pengetahuan kritis yang menyingkap bias struktural sekaligus menegosiasikan makna profesionalisme dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

REKOMENDASI

Rekomendasi ini memuat sejumlah hal yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian lainnya yang akan datang, khususnya mengenai topik kesetaraan gender dalam ranah pekerjaan dan kajian sudut pandang perempuan dalam industri media massa. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada dinamika pengalaman diskriminasi gender jurnalis perempuan dengan melibatkan informan yang lebih beragam, mulai dari posisi jabatan, media yang dijalani, lama pengalaman, hingga kasus unik dan spesifik yang belum pernah ditemui dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menyoroti peran atau keterlibatan lingkungan sosial, baik keluarga maupun komunitas di luar ruang redaksi, dalam membentuk ketahanan dan motivasi jurnalis perempuan menghadapi diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashaf, A. F., Kartika, T., & University of Lampung, Indonesia. (2019). Victim or Actors: The Typology of Indonesian Woman Journalists. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(1), 29–40.
<https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3501-03>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Idris, I., Krismantari, I., Ariyanti, R., & Sudarmanti, R. (2021). *Proyek Riset Nasional: Gambaran dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Media di Indonesia*. Rajawali Buana Pustaka.
<https://drive.google.com/file/d/16vT82yCcXoPsQ1fzVAUM4mq6MBfOHYDE/view>
- Ihromi, T. O., Irianto, S., & Luhulima, A. S. (Ed.). (2000). *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Penerbit Alumi.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945*. Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (1984). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Pemerintah Pusat.
- Indonesia. (2003). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Pemerintah Pusat.
- Luviana. (2012). *Jejak Jurnalis Perempuan (Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia)*. Aliansi Jurnalis Independen.
- Masduki, Ahmad Arif, Febrina Galuh, Engelbertus Wendratama, & Putri Laksmi Nurul Suci. (2025). *Potret Jurnalis Indonesia 2025 (Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi Digital dan Kekerasan terhadap Jurnalis)*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar Gender: Buku Pertama (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial*,

Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM). IndonesiaTera.

- Rahayu, Wendratama, E., Masduki, Kurnia, N., Rianto, P., Yusuf, I. A., Wahyono, S. B., Zuhri, S., Aprilia, M. P., Poerwaningtias, I., & Rohmah, F. N. (2021). *Hasil Survei Nasional 2021: Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).
- Satriyani, & Siti Hariti. (2008). *Women in Public Sector*. Tiara Wacana.
- Stellarosa, Y., & Martha, W. S. (2019). Perempuan, Media, dan Profesi Jurnalis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 97–109.
- Wendratama, E., Masduki, Aprilia, M. P., & Suci, P. L. N. (2023). *Jalan Terjal Menuju Kesetaraan (Laporan Riset Diskriminasi Gender di Organisasi Media)*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI).